

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Secara konseptual, definisi peran atau peranan sebagaimana diungkapkan oleh Gross, Mason dan Eachern adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁵ Dengan kata lain, dalam peranan atau peran terdapat dua macam harapan yakni, (1). Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. (2). Harapan-harapan yang diwakili oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa makna peran biasa dipahami sebagai bagian dari struktur masyarakat, misalnya : dalam pekerjaan, keluarga dan kekuasaan. Dengan demikian, peran merupakan wujud dari aktifitas-aktifitas seseorang atau lembaga yang mempunyai pengaruh terhadap orang lain atau lingkungan. Selibuhnya, peran biasa dimaknai sebagai atribut yang timbul sebagai akibat dari status dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota dan dari masyarakat terhadap pemegang status.⁶

Maurice Duverger sebagaimana mengutip pendapat Stoetzel, menyatakan bahwa status atau kedudukan adalah pola kolektif yang secara normal biasa diharapkan dari orang lain. Sedangkan peran atau peranan adalah pola perilaku kolektif

⁵ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, dalam edisi Indonesia (Jakarta : PT. Rajawali, 1981) hal. 99

⁶ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*. Penerjemah Daniel Dhakida, (Jakarta : PT. Rajawali. 1993) hal. 110.

orang lain yang diharapkan terhadap pemegang status atau kedudukan. Secara teoritik, eksistensi kedudukan dan peranan tidak bisa dipisahkan, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari kedua kata tersebut tidak selalu identik. Artinya, orang yang memiliki peranan belum tentu memiliki kedudukan. Sebaliknya orang yang memiliki kedudukan tentu memiliki peranan.

Status dan peranan tidak dapat dipisahkan. Status adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya.

Status ada dua macam. Pertama, Ascribed Status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kedua, Achieved Status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranannya⁷.

B. Ninik Namak/Datuk

Pengertian Datuk Menurut Kamus Sosiologi yaitu : 1). Penghulu Adat di Minangkabau. 2). Gelar kehormatan bagi orang yang dituakan (yang punya martabat) dimata masyarakat

⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002) hal. 239-246

dan lingkungan adatnya. Pengertian Ninik Mamak adalah Penghulu-Penghulu adat dan para Pinisepuh di Minangkabau.⁸

Ada beberapa pengertian antara Mamak, Ninik Mamak, Mamak Pemangku Adat, Penghulu dan KAN. Untuk jelasnya dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Mamak

Adalah seorang yang ada hubungannya dengan ibu kita, umpamanya saudara laki-laki, adik atau kakaknya, atau yang sama fungsinya dengan itu.

2. Ninik Mamak

Adalah seorang laki-laki dari suatu kaum, telah dituakan dan jadi "tampek baiyo dan bamolah" (bermusyawarah) walupun ia masih muda. Dalam hal ini termasuk Mamak Kepala Jurai dan Mamak Kepala Waris dalam kaum, apakah dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun. Karena itu kita sering mendengar dalam pertemuan dan rapat-rapat, kata-kata yang diucapkan oleh penceramah menyebutkan "Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai.

3. Ninik Mamak Pemangku Adat

Adalah seorang Ninik Mamak diberi tugas oleh kaumnya di dalam Nagari, seperti:

- a. Imam Khatib dengan tugas tertentu
- b. Labai/Pandito dengan tugas tertentu.
- c. Rang Tuo Adat/Ninik Mamak dengan tugas tertentu
- d. Dan lain lain.

⁸ Dahlan Yakub Al-Barry, *Kamus Sosiologi antropologi* (Surabaya: Indah) Hal. 52

Dan ini dijamukan dalam nagari, digelar gelar pusaka menurut adat. Orang-orang ini didalam adat dapat di ibaratkan "garundang gadang di kubangan" kecuali Pandito merupakan suluh bendang dalam nagari menurut adat.

4. Penghulu/Datuk

Adalah seorang Ninik Mamak dalam kaum/suku, berdasarkan syarat-syarat yang cukup menurut adat, diangkat jadi pucuk pimpinan di dalam nagari, dijamukan, serta dilewakan gelar pusaknya ditengah-tengah masyarakat dalam Nagari, sehingga seorang itu resmi jadi Penghulu, dan dalam adat disebutkan "Ikan Rayo di Lautan" Penghulu itu bertugas menurut adat :

Kusuik akan manyalasaikan
Karuah akan manjaniahkan
Mambalah taampuluo
Manimbang samo barek
Bakato bana bajalan luruih
Biang nan akan manabuakkan
Gantiang akan mamutuihkan
Kato putuih hukum bajalan

Dan kalau dapat diumpamakan, Penghulu adalah jabatan tertinggi menurut adat. Penghulu dapat diberhentikan bilamana melanggar undang-undang, diantaranya disebut menurut adat undang-undang "nan duo puluah" Sedangkan untuk Datuk tidak dapat diberhentikan, karena sifatnya "Patah tumbuh hilang baganti" karena itu seorang Penghulu mesti Datuk, tetapi Datuk belum tentu Penghulu.⁹

⁹ www.padangekspres.com

Menurut Tambo Alam Minangkabau, asal mula adanya Datuk ini diceritakan dalam sebuah kisah sebagai berikut : Setelah nenek moyang orang Minangkabau mempunyai tempat tinggal yang tetap, maka untuk menjamin kerukunan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan keluarga, dibentuklah semacam Pemerintahan suku. Tiap Suku dikepalai oleh seorang Penghulu Suku. Penghulu berarti Kepala Kaum. Semua Penghulu bergelar Datuk. Datuk artinya orang berilmu, orang pandai yang dituakan.

Pada suatu waktu bermusyawarahlah Sri Maharaja Diraja dengan Datuk Suri Diraja dan Cateri Bilang Pandai, serta masyarakat dari kampung Pariangan dan Padang Panjang di sebuah balai adat. Musyawarah itu untuk memilih orang yang akan memerintah dan menghukum dibawah Raja. Orang yang diangkat jadi Ketua ini adalah orang yang akan menjadi Penghulu dengan fungsi antara lain :

- Kusuik yang akan menyelesaikan
- Keruh yang akan menjernihkan
- Sesat yang akan menghimbau
- Terluncur yang akan mengelakan.

Dalam musyawarah itu dicapai kata sepakat yakni untuk mengangkat dua orang Ketua, seorang di Pariangan dan seorang lagi di Padang Panjang. Setelah Sri Maharaja Diraja berfikir karena diantara yang hadir tidak ada yang dapat memberikan nama kepada dua orang Ketua yang baru diangkat, maka dia mengusulkan nama tersebut "Datuk".

Sejak itu Panggilan Datuk sampai sekarang tidak berubah. Itulah asal mulanya Penghulu itu dipanggil Datuk dan disebut juga Ninik Mamak yaitu Ninik dari orang banyak.

Datuk yang pertama bernama Datuk Bandaharo Kayo, menetap di Pariangan. Kedua, Datuk Maharaja Besar menetap di Padang Panjang.

Seorang Penghulu yang memakai gelar "Datuk" memegang peranan yang sangat penting didalam masyarakat Minangkabau. Seorang Penghulu tidak hanya bertindak sebagai kepala dalam persukuan, tapi ia juga dengan aktif ikut serta dalam pemerintahan nagari. Dialah tempat anak kemenakannya mengadakan sakit dan senang, tempat bertanya kalau akan pergi dan tempat mengadu bila kembali pulang. Mereka dipandang sebagai orang yang cerdas cendikia, mengetahui lapuk akan menghimpit dan condong yang akan menimpa. Mereka yang akan mengetahui dan harus mengetahui peraturan-peraturan tata tertib kemasyarakatan dalam lingkungan persukuan dan nagarinya. Disamping itu seorang penghulu juga harus tahu akan hereng dan gendeng (siasat) yang akan menguntungkan dan merugikan kepada anak kemenakannya masing-masing.

Karena itu seorang Penghulu haruslah seorang yang cerdas dan tangkas, seorang yang lapang dada dan banyak pengetahuannya. Biasanya pangkat seorang Penghulu adalah pangkat dan kedudukan yang turun temurun, dari Ninik ke Mamak, dari Mamak ke Kemanakan.

Kedudukan Penghulu dalam tiap Nagari tidak sama. Ada Nagari yang Penghulunya mempunyai kedudukan yang setingkat dan sederajat. Penghulu yang setingkat ini adalah di Nagari yang menganut laras (aliran) *Bodi-Caniago* dari keturunan Datuk Perpatih Nan sabatang. Sebaliknya ada pula nagari yang kedudukan Penghulunya bertingkat-tingkat yang didalam adat yang disebut "Berjenjang naik bertangga turun", yaitu para Penghulu yang menganut laras *Koto-Piliang* dari ajaran Datuk

Katumanggung. Kendatipun kedudukan para Penghulu berbeda dikedua ajaran adat itu, namun keduanya menganut paham demokrasi. Demokrasi itu tidak ditunjukkan pada cara duduknya dalam persidangan, tetapi demokrasi ditentukan oleh system musyawarah-mufakat. Kedua sistem itu menempuh cara yang sama dalam mengambil keputusan, yaitu cara musyawarah untuk mufakat. Kedudukan dan peranan Penghulu, didalam pepatah adat disebutkan ; Luhak bapanghulu, Rantau barajo.

Hal ini berarti bahwa penguasa tertinggi pengaturan masyarakat adat di daerah Luhak nan Tigo, Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak 50 Koto berada ditangan para Penghulu. Jadi Penghulu memegang peranan utama dalam kehidupan masyarakat adat. Dengan ringkasnya dapat dirumuskan kedudukan peranan Penghulu sbb;

- a. Sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaumnya sesuai rumusan adat.
- b. Sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya.
- c. Sebagai Hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sengketa dalam kaumnya.
- d. Sebagai tumpuan harapan dalam mengatasi kesulitan kehidupan kaumnya.¹⁰

Syarat untuk menjadi seorang Penghulu Adat di Minangkabau secara mutlak ditetapkan bahwa seorang Penghulu haruslah seorang pria dan tidak boleh wanita. Satu dan lain hal karena empat unsur utama harus dimiliki seorang Penghulu seperti : sebagai Pemimpin, Pelindung, Hakim dan Pengayom dimana ini merupakan unsur-unsur yang sangat dominan dalam menentukan kekuasaan, dan itu biasanya berada ditangan pria yaitu di tangan Penghulu yang justru mutlak seorang pria.

¹⁰ Amir. M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta Pusat : 1999) hal. 67 - 68

Seseorang dapat diangkat menjadi Penghulu bila memenuhi beberapa syarat ;

- a. Berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdas pandai.
- b. Orang yang arif bijaksana.
- c. Paham akan landasan pikir dan hukum adat Minangkabau.
- d. Hanya kaum pria yang akhil-balig, berakal sehat.¹¹

Sesuai dengan pendapat Karl D Jackson, seorang pemimpin tradisional itu mempunyai *Kewibawaan Tradisional*. Kewibawaan tradisional itu diartikan sebagai interaksi antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok dimana pada saat tertentu seorang pelaku (yang mempengaruhi kita sebut saja dia "R") mengubah pelaku kedua (yang dipengaruhi kita sebut dia "E") dengan ciri-cirinya "R" mengirim pesan kepada "E" dan "E" mengambalnya sebagai dasar perilakunya :

1. Tanpa menilai permintaan "R" menurut syarat-syarat standarnya sendiri atau
2. Penilaiannya semula atas permintaan itu berdasarkan syarat standar dan kepentingannya sendiri.

"E" mengambil pesan itu sebagai dasar perilakunya karena persepsinya tentang adanya kewajiban timbal balik yang tersebar, telah berlangsung lama, berisi kecenderungan mawas diri dan bersifat mengikat antara "R" dan dirinya sendiri.¹²

Kewibawaan tradisional adalah penggunaan kekuasaan personalitis yang dihimpun melalui peranan masa lampau dan masa kini dari yang mempengaruhi (R) sebagai penyedia, pelindung, pendidik, sumber-sumber nilai dan status unggul dari

¹¹ Ibid., hal. 70

¹² Karl D Jacksons, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan* (Jakarta : Grafiti, 1990) hal. 201

mereka yang mempunyai hubungan ketergantungan yang mapan dengannya. Sekali telah mapan, tokoh kewibawaan tradisional tak perlu mengancam, menawarkan imbalan benda atau yang bersifat lambang, mencoba menganjurkan atau mengacu kepada aturan yang mengatur peranan-peranan. Perintah-perintahnya diterima semata-mata atas dasar siapa dia dan hubungan tertentu yang tersebar dan bersifat pribadi yang telah dipeliharanya dengan setiap pengikutnya.

Max Weber berpendapat bahwa, seorang pemimpin tradisional juga mempunyai Otoritas Tradisional, yang berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Jadi alasan penting orang taat pada struktur otoritas itu adalah kepercayaan mereka bahwa hal itu sudah selalu ada. Mereka yang menggunakan otoritas termasuk dalam suatu kelompok status secara tradisional menggunakan otoritas atau mereka dipilih sesuai peraturan-peraturan yang dihormati sepanjang waktu.

Hubungan antara tokoh yang memiliki otoritas dan bawahannya pada dasarnya merupakan hubungan pribadi. Mereka yang patuh memiliki rasa setia pribadi kepada pemimpinnya dan bawahannya terikat oleh peraturan-peraturan tradisionil masih ada kekuasaan bagi atasannya secara dalam menggunakan otoritasnya, dan dalam keadaan seperti itu bawahan terpaksa taat.

Weber membedakan tiga otoritas tradisional :

1. Gerontokrasi yaitu pengawasan berada pada tangan orang-orang tua dalam suatu kelompok.
2. Patriakalisme yaitu pengawasan berada dalam tangan suatu satuan kekerabatan (rumah tangga) yang dipegang oleh individu tertentu yang memiliki otoritas warisan.

Dalam kedua system ini tidak ada staf administrasi seperti lazimnya kita kenal dan bawahannya merupakan anggota kelompok itu yang namanya otoritas dilaksanakan.¹³

Menurut Malinowski ada fungsi sosial dalam empat tingkat abstraksi; 1). Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai *pengaruh* atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat. 2). Fungsi sosial dari suatu adat, pranata social atau unsur kebudayaan mengenai efeknya terhadap *kebutuhan* suatu adat atau pranata lain untuk *mencapai maksudnya*, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.3). Fungsi social dari suatu adat atau pranata social mengenai pengaruh atau efeknya terhadap *kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi* dari suatu sistem sosial yang tertentu. 4). Segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya.¹⁴

C. Ketahanan Nasional

Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Kedua kebutuhan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia tsb, hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan akan dapat diwujudkan manakala terciptanya rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula keadaannya dengan keamanan, dimana keamanan akan sulit diwujudkan, manakala kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat tidak terciptakan.

¹³ Doyle Paule Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen di Indonesiakan* oleh :Robert MZ Lawang (Jakarta : Gramedia,1986) hal.227-228

¹⁴ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta : UI Press, 1987) hlm.175

Dengan terwujudnya kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat, selanjutnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadaan semacam ini dengan sendirinya diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup serta mengembangkan kehidupan menuju suatu masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang demikian itu, bangsa Indonesia selalu berinteraksi baik dengan lingkungan sendiri, maupun dengan luar lingkungannya. Keadaan semacam ini membuat tidak mungkin mengelakkan diri dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk dapat mempertahankan dan melindungi dari berbagai ancaman tersebut, maka masyarakat dan bangsa Indonesia dituntut untuk memiliki suatu kekuatan yaitu yang mampu menghadapi dan mengatasi setiap ancaman dari manapun datangnya. Kekuatan tersebut pada hakekatnya berisi keuletan dan ketangguhan, dan inilah yang dinamakan *Ketahanan Nasional*.

Dalam GBHN pengertian Ketahanan Nasional adalah : Kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kejayaan bangsa dan Negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.

Dari rumusan diatas, kenyataan bahwa keuletan dan ketangguhan yang mendukung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, merupakan dua unsur yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia, guna

mewujudkan cita-cita nasionalnya, yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan dilaksanakan melalui pembangunan nasional, yang berencana, bertahap dan berkesinambungan. Hasil pembangunan tersebut secara nyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di semua aspek kehidupan bangsa, walaupun disadari, masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kegagalan-kegagalan dalam beberapa hal.

Dilihat dari konsepsi ketahanan nasional, semua aspek kehidupan bangsa tersebut, terangkum dalam Astagatra – delapan aspek kehidupan nasional – yang terdiri dari Tri gatra. Tri gatra – tiga aspek alamiah, terdiri dari geografi, kekayaan alam, dan demografi/kependudukan. Panca gatra - lima aspek, meliputi aspek: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Panca gatra merupakan aspek kehidupan nasional yang menyangkut pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentunya dengan aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Kelima aspek sosial tersebut mengandung unsur-unsur yang dinamis

Antara Tri gatra dan Panca gatra serta diantara gatra-gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali yang dinamakan korelasi interdependensi. Hubungan antara gatra dalam tri gatra adalah hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, sedangkan hubungan gatra-gatra dalam panca gatra merupakan hubungan timbal balik yang erat dan kait-mengait secara utuh, menyeluruh, dalam arti saling mengisi, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Nasional Indonesia,

menganut azas pendekatan kesejahteraan, keamanan, komprehensif integral dalam mengembangkan aspek-aspek kehidupan nasional. Berbicara mengenai ketahanan nasional, kita dapat melihat dari tiga wajah atau sudut pandang, yaitu ketahanan nasional sebagai (1) kondisi, (2) doktrin, (3) pemecahan masalah. Menurut Soewarso¹⁵ Ketahanan Nasional memiliki 3 (tiga) wajah, yaitu :

1. Wajah sebagai kondisi atau wajah Ontologik
2. Wajah sebagai doktrin atau wajah Aksiologik
3. Wajah sebagai pemecahan persoalan atau wajah Epistemologik.

Beberapa rumusan Ketahanan Nasional sebagai kondisi ditemukan sebagai berikut ;

Menurut WAHYONO K ; Ketahanan nasional sebagai kondisi dapat disimpulkan sebagai kemampuan bangsa Indonesia yang mengandung unsur-unsur keuletan dan ketangguhan. Dengan kemampuan ini bangsa Indonesia mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menghadapi segala jenis ancaman, hambatan dan gangguan dari manapun datangnya, serta mampu mencapai tujuan perjuangan nasional secara bertahap. Sutopo Yuwono merumuskan ; Ketahanan Nasional sebagai kondisi sama artinya dengan pembangunan nasional. Ketahanan nasional meningkat, maka pembangunan nasional akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya, bila ketahanan nasional menurun, maka pembangunan nasional akan menurun juga. Sedangkan menurut R. M. SUNARDI, Ketahanan nasional sebagai kondisi : Mengandung anasir-anasir dasar ketangguhan dan keuletan Bangsa yang mengembangkan kekuatan nasional

¹⁵ Laksda TNI Soewarso, Msc, Teori Ketahanan Nasional (Jakarta : Lemhanas. 1982) Hal.456

didalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan Nasional.

Dengan demikian ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dari sistem kehidupan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional, dimana setiap aspek atau gatra, terjalin hubungan yang saling terkait secara utuh dan menyeluruh, dan sekaligus membentuk tata laku masyarakat dan bangsa dalam sistem kehidupan tersebut.

Agar terwujud dan terpelihara kondisi sistem kehidupan nasional, diperlukan suatu kekuatan yang berkemampuan untuk mengembangkan aspek kehidupan bangsa, yang dinamakan ketahanan nasional (K), dengan unsur-unsur dominannya adalah keuletan (U) dan ketangguhan (T).

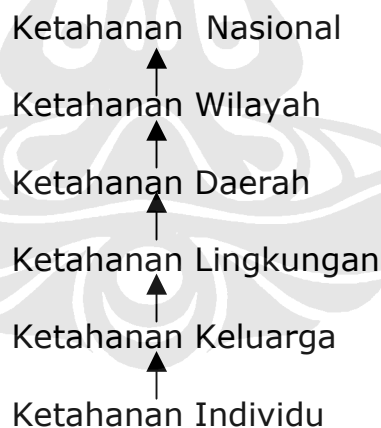
Keuletan (U) merupakan kemampuan bangsa untuk kemampuan (mengabsorpsi) pengaruh dari lingkungan yang berupa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketangguhan (T) adalah kekuatan yang sifatnya memancar keluar, sehingga bersifat penangkal. Sehubungan dengan itu kedua unsur tersebut merupakan sesuatu kebutuhan pokok yang tak terelakkan, manakala suatu bangsa berkeinginan menjadi suatu bangsa yang maju dan disegani oleh bangsa lain.

Ketahanan Nasional sebagai kondisi, bersifat dinamis, artinya akan selalu berubah menurut waktu sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh seluruh bangsa melalui pembangunan. Dengan perkataan lain, perubahan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kondisi dari keuletan dan ketangguhan yang dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh bangsa sebagai

hasil dari pembangunan. Oleh karena itu kondisi ketahanan nasional pada waktu tertentu, merupakan hasil perpaduan dari unsur keuletan (U) dengan unsur ketangguhan (T).

Ketahanan Nasional merupakan akumulasi dan pengintegrasian dari masing-masing ketahanan wilayah, ketahanan wilayah merupakan akumulasi dari ketahanan daerah, dan ketahanan daerah merupakan akumulasi dan pengintegrasian dari ketahanan lingkungan dan ketahanan keluarga. Dengan demikian Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi oleh ketahanan daerah, dan ketahanan daerah merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Disisi lain kondisi ketahanan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuletan (U) dan ketangguhan (T), masyarakat yang berada dalam lingkungan daerah tertentu.

Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara masing-masing ketahanan tersebut diatas, dapat digambarkan sebagai berikut :



Ketahanan nasional merupakan suatu keadaan nyata yang harus diwujudkan, sedangkan pembangunan nasional merupakan proses kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan kondisi sistim kehidupan nasional sedemikian rupa, agar berkemampuan menghadapi dampak lingkungan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, sehingga sistem kehidupan nasional dapat berkembang berkelanjutan.

Ketahanan nasional membutuhkan unsur ulet dan tangguh dalam semua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Aspek kehidupan tersebut akan ulet dan tangguh apabila ditopang individu-individu sebagai anggota masyarakat, atau kelompok masyarakat telah mempunyai kemampuan yang berisi keuletan dan ketangguhan, serta pemimpin yang berpotensi dalam menggerakkan masyarakatnya. Dengan demikian seluruh anggota dan lapisan masyarakat sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing, berkewajiban mensukseskan pembangunan nasional.

D. Katahanan Daerah

Pada hakekatnya ketahanan nasional adalah resultan dan perpaduan dari seluruh ketahanan tiap-tiap wilayah atau daerah, sedangkan ketahanan wilayah atau daerah merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Akibat dari saling hubungan dan ketergantungan itu ialah, bahwa kondisi Ketahanan nasional yang mantap dan dinamis tidak akan terwujud manakala ketahanan ditiap-tiap wilayah dan berada didalam kondisi rawan.

Kerawanan di suatu wilayah dan daerah akan mempengaruhi wilayah atau daerah yang lain, dan pada gilirannya akan berpengaruh pula kepada stabilitas ketahanan nasional. Oleh karena itu setiap wilayah dan daerah harus mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mewujudkan daya kekebalan dan daya penangkalan, agar dapat mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar dan dari dalam lingkungan. Kekuatan dan kemampuan seperti itulah yang disebut dengan **ketahanan wilayah atau ketahanan daerah**.

Untuk menciptakan kondisi ketahanan wilayah atau ketahanan daerah yang mantap dan dinamis, masyarakat harus

mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam mengelola dan mengembangkan aspek-aspek kehidupan nasionalnya.

Masyarakat desa yang terdiri dari individu-individu dan kelompok keluarga yang mempunyai daya ulet dan daya tangguh (ketahanan keluarga), merupakan titik awal dari terbentuknya ketahanan lingkungan. Lemahnya ketahanan keluarga akan berpengaruh kepada ketahanan lingkungan dan seterusnya kepada ketahanan daerah dan wilayah, dan akhirnya kepada ketahanan nasional.

Oleh karena itu untuk menggerakkan, mengarahkan, membina individu, kelompok masyarakat, keluarga, dalam daerah tertentu agar mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut adalah sangat penting. Upaya seperti itu bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini disebabkan setiap kelompok masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sesuai dengan norma sosial dan adat yang mempengaruhinya. Bahkan mereka kadangkala lebih patuh dan setia kepada pemimpin yang mereka angkat sendiri, ketimbang pemimpin formal atau pemimpin resmi.

Dengan demikian untuk menciptakan suatu ketahanan daerah yang mantap, stabil dan dinamis, upaya awal yang harus dilakukan ialah menciptakan dan melahirkan suatu masyarakat yang ulet dan tangguh. Untuk menciptakan kondisi masyarakat seperti itu, maka seluruh anggota masyarakat sesuai dengan kedudukan dan peranannya harus dapat memerankan kewajibannya, sehingga dengan tingkah laku pemerannya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan, rasa aman anggota masyarakat.

Peranan seperti itu antara lain dapat diperankan oleh anggota masyarakat yang dipanggil Datuk. Datuk adalah

seorang pemimpin informal yang terdapat dilingkungan masyarakat keluarga Minangkabau.

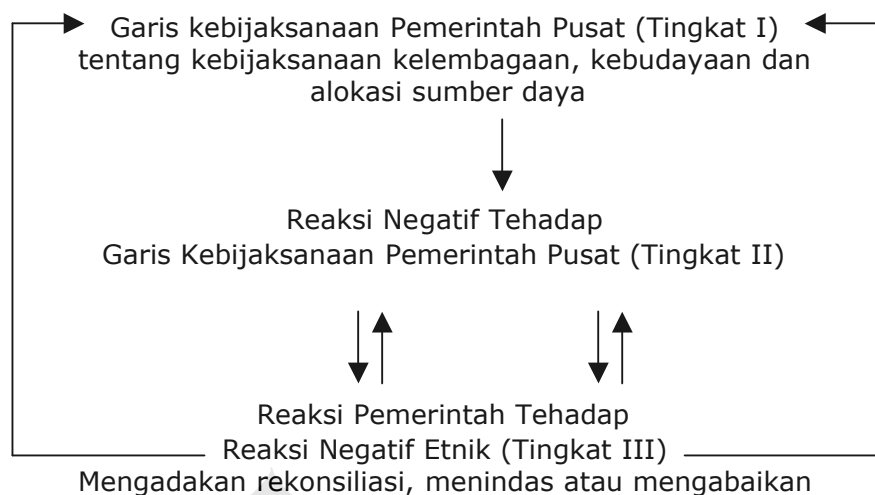
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan media komunikasi telah memperluas jaringan sosial. Meluasnya jaringan sosial berpengaruh pula terhadap kedudukan dan peran Datuk. Apabila mereka mendapatkan kedudukan dan melaksanakan perannya sesuai norma, tata aturan yang berlaku, merupakan kesepakatan dari anggota masyarakat, ditambah lagi dengan gaya kepemimpinan yang menimbulkan rasa percaya dan rasa senang masyarakat, niscaya dapat terciptanya kestabilan dalam masyarakat. Vektor ketahanan (Kt) bergerak naik, dalam arti keuletan (U) dan ketangguhan (T) meningkat. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengolah potensi lingkungan sebaik-baiknya, dalam melanjutkan dan meningkatkan kehidupannya. Sebaliknya, bila mereka dalam menempati kedudukan dalam masyarakat dan melaksanakan perannya tidak sesuai dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dan lain sejenisnya, maka akan bermunculan konflik, baik antara sesama anggota masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pemimpin. Keadaan seperti ini menandakan stabilitas kurang mantap, artinya vector ketahanan (Kt) bergerak mendekati sumbu tegak (U) atau mendekati sumbu datar (T).¹⁶

Menurut Saafroedin Bahar ¹⁷, dewasa ini perkembangan konseptual ketahanan nasional belum dapat memberikan jawaban jelas terhadap masalah etnik dan etnisitas sebagai fenomena politik sejangat. Masalah etnik cenderung difahami dari

¹⁶ Alwir Darwis, *Kedudukan dan Peranan Pemimpin Informal dalam Menggalang Ketahanan Nasional : Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah Kotamadya Padang provinsi Sumatera Barat* , Tesis Master (Jakarta : Program PKN Pascasarjana UI,1997) hal.78

¹⁷ Ichlasul Amal & Armady Armawi, *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional* (Yogyakarta : Gajah Mada university Press , 1996) hal.181

segi sekuriti semata. Konotasi itu yang melekat dengan akronim SARA. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih seimbang, amat urgen untuk mengembangkan dimensi teoritikal Ketahanan Nasional yang belum cukup berkembang. Pemikiran mengenai gatra ideologi, politik dan keamanan ternyata lebih jauh berkembang dibanding dengan gatra sosial ekonomi dan gatra sosial budaya. Padahal justru dalam kedua gatra ini terletak akar masalah etnis. Gregory-Ellinwood menafsirkan masalah etnisitas dengan Ketahanan Nasional suatu bangsa, dalam kerangka struktural antara unsur konstitutif Negara masalah etnik jelas termasuk hubungan dalam hubungan antara Rakyat dengan Pemerintah. Masalah etnisitas perlu dibahas dari segi hubungan timbal balik antara etnik dengan Pemerintah Nasional. Oleh karena kekuasaan politik berada pada Pemerintah Nasional, maka yang dapat dilakukan etnik sekedar memberikan reaksi terhadap kebijaksanaan yang dianut oleh Pemerintah Nasional. Kebijaksanaan Pemerintah Nasional merupakan suatu variabel bebas, sedangkan reaksi etnik merupakan variabel terikat dari kehidupan politik nasional. Sesungguhnya akar dari masalah etnik dan etnisitas ini harus dicari pada kebijaksanaan Pemerintah Pusat, dan bukan pada reaksi etnik itu sendiri. Perubahan kebijaksanaan Pemerintah Pusat, apalagi perubahan tokoh-tokoh elite Pemerintah Pusat, akan mempunyai dampak langsung pada penyelesaian masalah etnik dan etnisitas. Visualisasi paradigma hubungan etnik dengan Pemerintah Pusat sebagai berikut :



Paradigma Gregory-Ellinwood tersebut diatas relatif mudah diterapkan untuk menafsirkan kondisi Ketahanan Nasional, khususnya dari segi etnik sebagai resiko keamanan. Adapun yang perlu dilakukan adalah menelaah persepsi etnik terhadap kebijaksanaan alokasi sumber daya nasional, disusul oleh reaksi Pemerintah Pusat terhadap persepsi etnik tersebut, selanjutnya bereaksi dengan etnik tersebut secara terus menerus, sampai ada kebijaksanaan baru dari pemerintah pusat.

Pada kasus peranan Ninik Mamak di Minangkabau pada umumnya dan Pakan Sinayan pada khususnya, Sebelum dilaksanakannya UU No.9 Tahun 1979 di Sumatera Barat, Ninik Mamak memegang peranan penting ditingkat nagari. Ninik Mamak disamping sebagai pemimpin didalam kaumnya juga duduk didalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Didalam (KAN) ini diantara sekian orang Ninik Mamak dipilih salah seorang Ninik Mamak yang akan duduk sebagai Wali Nagari . Wali Nagari inilah nantinya yang akan menjalankan Pemerintahan nagari baik keluar maupun kedalam. Setelah keluarnya UU No.5 Tahun 1979 fungsi Ninik Mamak ini dihapuskan. Terjadi Reaksi Tingkat I, Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1979 tentang penyeragaman bentuk

pemerintahan terendah Desa di Republik Indonesia. Timbul reaksi Tingkat II, reaksi negatif etnik Minangkabau khususnya Ninik Mamak terhadap garis kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan akhirnya menimbulkan sikap apatis dari Ninik Mamak terhadap program Pemerintah yang dilaksanakan di Desa. Reaksi Tingkat III, reaksi Pemerintah terhadap reaksi negatif etnik Minangkabau Khususnya terhadap Ninik mamak yang dihadapi Pemerintah dengan sikap mengabaikannya. Dari sini timbul rasa frustrasi kalangan kelompok Ninik Mamak dan berdampak kepada bidang politik dan keamanan. Kenapa Ninik Mamak protes pada waktu pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979, karena terjadi kehancuran institusi lokal tradisional yang sudah lama ada yaitu lembaga yang mengatur tidak hanya tingkah laku sosial dan kultural dari rakyat dipedalaman, tetapi juga basis ekonomi masyarakat dalam hal tanah, warisan pengolahan sawah. Biasanya Pimpinan Nagari dipilih dari Datuk berbagai suku yang ada didalam (KAN). Perubahan ini menyebabkan disorientasi dalam kehidupan rakyat di pedesaan ketika bentuk kekuasaan simbolis tradisional mereka dan segala isinya dirampas. Ninik Mamak memandang Pemerintahan Desa yang baru sebagai ciptaan Pemerintah Pusat, banyak yang kehilangan keinginan atau kemampuan untuk ambil bagian dalam pembangunan. Makin lama Ninik Mamak menganggap bahwa Pemerintah Pusat adalah penguasa yang bertanggung-jawab untuk membangun daerah dan menyerahkan ke pusat untuk mengerjakannya. Selain itu pengukuhan desa oleh Pemerintah Pusat diartikan oleh para Ninik Mamak sebagai penghapusan sisa otonomi lokal dan memaksakan dominasi Jawa.¹⁸

¹⁸ Audrey Kahin, op.cit., hal.409 - 411

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengembalikan kembali fungsi Ninik Mamak yang tercantum dalam pasal yang berbunyi ; bahwa pemerintahan daerah yang dibuat untuk mengatur pemerintahan desa dan kelurahan harus menghargai asal usul desa, menghormati adat istiadatnya serta mengembangkan kelembagaan tradisional yang ada. Kembalinya sistem nagari di Minangkabau merupakan kesadaran bahwa perbedaan yang ada dalam pemerintahan desa merupakan sebuah kekayaan yang mahal harganya.¹⁹

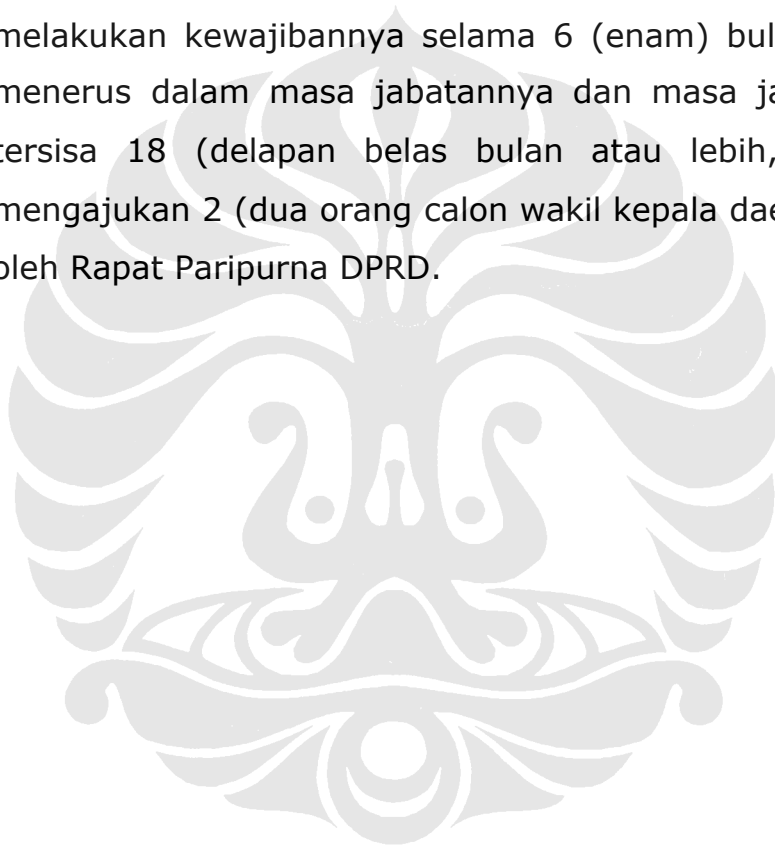
Melalui pertimbangan yang matang dan disimpulkan bahwa UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti, maka keluarlah UU No.32 tahun 2004. Disini desa dikatakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaanya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

¹⁹ Yayuk Yulianti, *sosiologi Pedesaan*, (Jogyakarta: Pustaka utama, 2003) hal, 231

masyarakat. Didesa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan lembaga ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Terjadi lagi perubahan UU No.32 tahun 2004 dengan UU No. 12 tahun 2008, karena ada beberapa kekosongan yang belum dibahas yaitu pengisian jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama 6 bulan secara terus menerus. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD. Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa

jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.



B A B III

GAMBARAN UMUM DAERAH PAKAN SINAYAN

A. Umum

Propinsi Sumatera Barat menurut kedudukannya terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan total wilayah sekitar 42.297 Km persegi (4.297.300 Ha) termasuk 375 buah pulau besar dan kecil. Secara administratif propinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten dan kota yaitu ; 1). Kabupaten Padang Pariaman. 2). Kabupaten Agam. 3). Kabupaten Pasaman. 4). Kabupaten Pasaman Barat. 5). Kabupaten 50 Kota. 6). Kabupaten Sawah Lunto. 7). Kabupaten Dharmasraya. 8). Kabupaten Solok. 9). Kabupaten Solok Selatan. 10). Kabupaten Tanah datar. 11). Kabupaten Pesisir Selatan. 12). Kabupaten Kepulauan Mentawai. 13). Kota Padang. 14). Kota Solok. 15). Kota Sawah Lunto. 16). Kota Payakumbuh. 17). Kota Bukittinggi. 18). Kota Padang Panjang. 19). Kota Pariaman.

Kabupaten Agam adalah salah satu dari 19 kabupaten yang terdapat di Sumatera Barat. Kabupaten Agam dibagi menjadi 15 kecamatan yaitu ; 1). Kecamatan IV Angkat. 2). Kecamatan IV Koto. 3). Kecamatan Ampek Nagari. 4). Kecamatan Banuhampu. 5). Kecamatan Baso. 6). Kecamatan Candung. 7). Kecamatan Kamang Magek. 8). Kecamatan Lubuk Basung. 9). Kecamatan Matur. 10). Kecamatan Palembayan. 11). Kecamatan Palupuh. 12). Kecamatan Sungai Puar. 13). Kecamatan Tanjung Mutiara. 14). Kecamatan Tanjung Raya. 15). Kecamatan Tilatang Kamang.

Kecamatan Banuhampu dibagi menjadi 7 Nagari yaitu ; 1). Nagari Taluak IV Suku. 2). **Nagari Pakan Sinayan**. 3). Nagari

Ladang Laweh. 4). Nagari Kubang Putih. 5). Nagari Padang Lua. 6). Nagari Cingkariang. 7). Nagari Sungai Tanang.

B. Sejarah

Penduduk Kabupaten Agam/Luhak Agam berasal dari Nagari Pariangan Padang Panjang. Kedatangan penduduk Luhak Agam pada mulanya empat kaum atau empat rombongan yang berlangsung empat periode dan tiap periode empat-empat. Periode pertama keempat rombongan ini mendirikan empat buah nagari yaitu nagari Biaro, Balai Gurah, Lambah dan Panampuang. Periode kedua mendirikan nagari Canduang, Koto Laweh, Kurai dan Banuhampu. Periode ketiga mendirikan nagari Sianok, Koto Gadang, Guguak dan Tabek Sarajo. Periode keempat mendirikan nagari Sariak, Sungai Pua, Batagak dan Batu Palano.

Banuhampu yang pada periode kedua hanya satu terdiri dari satu nagari kemudian di pecah lagi menjadi beberapa nagari yaitu nagari Taluak IV Suku, nagari Pakan Sinayan, Nagari ladang Laweh, Nagari Kubang Putih, Nagari Padang Lua, Nagari Cingkariang, Nagari Sungai Tanang.²⁰

Pada waktu penjajahan Belanda Banuhampu merupakan sebuah kecamatan yang berada di order distrik Sariak IV Koto dan beribu kota di Koto Tuo (kecamatan IV Koto Sekarang) dengan pimpinan pemerintahan disebut "Asisten Demang". Di bawah Asisten Demang adalah Nagari yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Sedangkan di tingkat Pemerintahan diatas Onder Distrik adalah "Afdeling Agam" dan berkedudukan di Bukittinggi sebagai ibu kota, serta dipimpin oleh Asisten Residen.

²⁰ *Materi Perbekelan Ninik Mamak Se-Kabupaten Agam 2002*

Pada era kemerdekaan Onder Distrik Sariak IV Koto dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Sebagai pemimpin kecamatan dipilih seorang Camat Militer. Dalam melaksanakan roda pemerintahannya dibantu oleh sebuah badan yang disebut Musyawarah Pemerintah Rakyat Kecamatan (MPRK). Ibu kota kecamatan waktu itu adalah Aia Kaciak (salah satu jorong di Nagari Kubang Putih sekarang). Setelah Agresi militer Belanda II kantor Camat Banuhampu Sungai Puar pindah ke Sungai Buluah, tepatnya di kantor Wali Nagari Cingkariang sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom dilingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Tengah, ibu kota kecamatan Banuhampu Sungai Puar adalah Sungai Buluah.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuklah perwakilan kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Hal ini berdasarkan pada Kep. Mendagri No. 138/2771/PUOD-1984 tanggal 15 Agustus 1984 serta Keputusan Gubernur provinsi Sumatera Barat No.337/GSB/1984 tanggal 15 Oktober 1984 dipimpin Camat Banuhampu dan Kepala Perwakilan Kecamatan Sariak.

Setelah berakhirnya era orde baru dan diganti oleh pemerintahan reformasi, maka lahir UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No.5 tahun 1974 dan UU No.5 tahun 1979 serta diiringi lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari dan seiring dengan itu Pemerintahan desa pun diganti dengan Pemerintahan Nagari. Berdasarkan Perda Kab. Agam No. 31 tahun 2001, perwakilan kecamatan pembantu

Banuhampu Sungai Puar didefinisikan menjadi kecamatan Banuhampu dan kecamatan Sungai Puar.

Kecamatan Banuhampu dengan luas 34.81 Km terdiri dari :

- (1). Nagari Taluak IV Suku
- (2). Nagari Pakan Sinayan
- (3). Nagari Ladang Laweh
- (4). Nagari Kubang Putih
- (5). Nagari Padang Lua
- (6). Nagari Cingkariang
- (7). Nagari Sungai Tanang²¹

Nagari Pakan Sinayan adalah salah satu dari tujuh nagari yang ada di kecamatan Banuhampu. Nagari Pakan Sinayan yang tadinya terdiri dari 10 jorong, setelah keluarnya UU No.5/1979, Nagari Pakan Sinayan dihilangkan dan jorong yang ada 10 buah berubah menjadi 10 Desa. Melalui SK Gubernur Sumatera Barat No. 337/GSB/1984 desa yang ada diciutkan menjadi tiga desa yaitu Desa Pakan Sinayan Barat, Desa Pakan Sinayan Tengah, Desa Pakan Sinayan Timur ,dan masing-masing desa terdiri dari 3 Dusun.

Dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari , pemerintahan Desa diganti dengan Pemerintahan Nagari seperti sebelum berlakunya UU no. 5 tahun 1979 , maka nagari Pakan Sinayan yang tadinya terdiri dari tiga desa dengan 9 buah Dusun dilebur kembali menjadi Nagari Pakan Sinayan dengan jumlah jorong menjadi 10 buah yaitu : Jorong Tobo Ladang, Jorong Surau Baru, Jorong Ladang Lungguak Batu, Jorong Cupak, Jorong Kandang Jilatang, Jorong Kalampayan, Jorong Kubu

²¹ *Banuhampu Dalam Angka Tahun 2006*

Anau, Jorong Tiagan, Jorong Tabek Sarian dan Jorong dalam Koto. Hal tersebut berlangsung sampai sekarang.

C. Letak Georafis

Luas Nagari Pakan Sinayan secara keseluruhan adalah 6,7 km², dengan ketinggian dari atas permukaan laut 1020 meter, suhu maksimum 24,4° C, dan minimum 15,3° C, dan kelembaban udara sekitar 81,6 % - 90 %. Curah hujan rata-rata 2000 mm/th, Kecepatan angin 15 - 25 Km/jam. Topografi daerah : Permukaan tanah tidak rata, berbukit - landai curam sedikit sekali yang datar.

Batas wilayah :

Sebelah Utara Nagari Guguk Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto
Sebelah Selatan Gunung Singgalang
Sebelah Timur Nagari Padang Lua
Sebelah Barat Kecamatan IV Koto

Jarak Kantor Nagari ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan propinsi.

1. Jarak ke ibu kota Propinsi	92,00 Km
2. Jarak ke ibu kota Kabupaten/Kota	60,00 Km
3. Jarak ke ibu kota Kecamatan	4,50 Km
4. Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi	2,00 Jam
5. Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten/kota	1,50 Jam
6. Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan	0,25Jam

D. Suku

Nagari Pakan Sinayan menggunakan pola adat Bodi Caniago, dengan jumlah Ninik Mamak 34 orang, yang terbagi menjadi 10 suku, yaitu:

- a). Suku Tanjuang
- b). Suku Koto
- c). Suku Simabur
- d). Suku Malayu
- e). Suku Jambak
- f). Suku Pili
- g). Suku Guci
- h). Suku Sikumbang
- i). Suku Pisang
- j). Suku Salayan

Dari 10 suku tersebut, masing-masing suku memiliki gelar Ninik Mamak dan dilengkapi kelengkapan adat yang disebut Fungsi Nan Ampek, yaitu :

- a). Imam : Bagindo Majolelo
- b). Khadi : Sukri Sutan Rajo Endah
- c). Khatib : Nazir Khatib Sulaiman
- d). Bilal : Muslim Kari Mudo

F. Data Penduduk

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Nagari Pakan Sinayan keseluruhannya berjumlah 5.977 orang, dengan perhitungan rasio berdasarkan jenis kelamin (sex ratio) 3.188 orang laki-laki dan 2.789 orang perempuan. Sedangkan yang berada dirantau sebanyak 2.050 orang, tergabung kedalam Ikatan Kasaiyoan Rantau Pakan Sinayan, tersebar di daerah Sumbar, Pekanbaru dan Jakarta.

2. Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah penduduk dibagi berdasarkan kelompok usia, yaitu:

- (1). 0 – 16 tahun : 1.195 orang
- (2). 17 – 25 tahun : 1.495 orang
- (3). 26 – 50 tahun : 1.495 orang
- (4). 51 tahun ke atas : 1.692 orang

3. Berdasarkan Pekerjaan dan Profesi

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan profesi, yaitu:

- (1). Bertani : 4.184 orang
- (2). Buruh : 1.195 orang
- (3). Berdagang : 298 orang
- (4). Pegawai dan pensiunan : 300 orang

Dari jenis pekerjaan dan profesi penduduk Nagari Pakan Sinayan, penghasilan perbulan rata-rata: ± Rp. 400.000,-

4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- (1). Tamat SD / Sederajat : 2.758 orang
- (2). Tamat SLTP / Sederajat : 2.184 orang
- (3). Tamat SLTA / Sederajat : 1.390 orang
- (4). Tamat Akademi / PT. : 541 orang

G. Data Kekayaan Fisik

1. Tanah Ulayat di Nagari Pakan Sinayan adalah tanah yang sudah dikuasai oleh nenek moyang dan sebagai pusako tinggi sampai saat ini, dan sekarang telah terbagi pada penguasaan suku, kaum sampai ke paruik, berbentuk :

- a). Sawah seluas 200 Ha²

- b). Perladangan seluas 300 Ha²
 - c). Perumahan dan pekarangan seluas 70 Ha²
2. Hutan di Nagari Pakan Sinayan berlokasi di bawah gunung Singgalang dengan luas 1,5 Km², yang telah terbagi menjadi ulayat suku dan selanjutnya menjadi ulayat kaum sampai penguasaan paruik. Hutan tersebut dimanfaatkan untuk bertanam tanaman tua seperti kopi dan kulit manis, dan sebagian digunakan menanam tanaman palawija.
 3. Bukit di Nagari Pakan Sinayan ada satu bernama Bukit Tiga Sesain.
 4. Gunung di Nagari Pakan Sinayan ada satu yaitu gunung Singgalang, dengan luas wilayah 1 km²
 5. Laut di Nagari Pakan Sinayan tidak ada
 6. Danau di Nagari Pakan Sinayan tidak ada
 7. Batang Air atau Sungai di Nagari Pakan Sinayan tidak ada.
 9. Saluran Air di Nagari Pakan Sinayan sudah ada sejak dahulu, berasal dari kecamatan IV Koto. Air ini dimanfaatkan oleh 4 nagari (Nagari Pakan Sinayan, Nagari Guguak Randah, Nagari Koto Tuo, dan Nagari Koto Gadang) untuk irigasi atau pengairan sawah-sawah. Pemakaiannya diatur secara bergilir oleh Dinas Pengairan kecamatan dimana Satu nagari di aliri selama 4 bulan dalam satu tahun.
 10. Kolam atau Tabek Nagari Pakan Sinayan dahulunya banyak, namun sekarang telah berkurang karena sumber air yang berasal dari nagari Sungai Tanang terkuras habis untuk memenuhi pasokan air PAM kota Bukittinggi sehingga air untuk tabek berkurang. Terdapat 3 lokasi tabek penguasaan nagari, yaitu di Dusun Surau Gadang ada 1 tabek dengan luas $\frac{1}{2}$ Ha², di Dusun Cupak ada satu tabek dengan luas $\frac{1}{4}$ Ha², dan di Dusun Tabek Sarian ada satu tabek dengan luas $\frac{1}{5}$ Ha², dan tabek lainnya adalah tabek yang berlokasi di mesjid dan hasilnya untuk

kekayaan mesjid serta tabek lainnya merupakan milik masyarakat secara pribadi.

11. Lapangan di Nagari Pakan Sinayan dibuat di atas tanah ulayat nagari berjumlah dua buah .Lapangan ini dimanfaatkan untuk kegiatan olah raga bola kaki seluas 1 Ha², dan kegiatan bola volly sekaligus lapangan bola takrow, berlokasi di sekitar sekolah dasar dan di depan kantor KAN.

12. Gelanggang atau Pemedanan di Nagari Pakan Sinayan ada satu yaitu terletak di antara perbatasan Kecamatan Banuhampu Sei. Puar dan Kecamatan IV Koto dibuat secara gotong royong dan dimanfaatkan untuk olahraga anak nagari dan sering digunakan untuk upacara negara.

13. Pasar di Nagari Pakan Sinayan tidak ada, sebagian masyarakat langsung berbelanja ke pasar Padang Luar yang berjarak sekitar 3 km.

14. Balai Adat di Nagari Pakan Sinayan di bangun sejak tahun 1979 di atas tanah nagari seluas (6 x 12) meter², berjumlah satu buah dengan kondisi bangunan permanen, dimanfaatkan untuk kantor KAN, rapat-rapat adat, dan sekaligus digunakan untuk kantor Wali Nagari Pakan Sinayan dengan status sementara hak pakai.

15. Masjid Jami' merupakan satu-satunya mesjid di Nagari Pakan Sinayan yang dibangun sejak zaman Belanda tahun 1920 di atas tanah nagari dengan luas (26 x 50) meter², dengan bentuk bangunan permanen.Kegiatan yang dilakukan yaitu shalat berjamaah lima waktu, wirid pengajian dan kegiatan Remaja serta MTQ sekali setahun.

16. Surau atau Mushalla di Nagari Pakan Sinayan dibangun atas swadaya masyarakat tiap jorong dengan jumlah 10 unit. Bentuk kegiatan yang masih aktif dilakukan yaitu shalat

berjamaah, wirid pengajian, dan kegiatan MDA/TPA serta khatam Qur'an 2 x setahun.

17. Tempat Rekreasi di Nagari Pakan Sinayan ada satu, berlokasi di sekitar Gunung Singgalang yang bernama Kayu Pinus.

18. Situs-situs Kebudayaan di Nagari Pakan Sinayan tidak ada.

19. Pandam Pekuburan di Nagari Pakan Sinayan dimiliki oleh masing-masing suku dan kaum dan langsung dikelola secara bersama oleh suku masing-masing, dengan luas rata-rata (7 x 25) meter².

20. Rumah Gadang di Nagari Pakan Sinayan tersisa dua rumah, sedangkan yang lainnya sudah banyak yang hancur/punah.

H. Data Kekayaan Non-Fisik

1. Pendidikan Adat di Nagari Pakan Sinayan diberikan oleh orang tua/sesepuh adat. Pendidikan tersebut meliputi pelatihan atau pengajian adat. Tempat pelaksanaan berlokasi di kantor Wali Jorong, di surau-surau, di rumah bahkan terkadang di warung-warung kopi.

2. Kesenian di Nagari Pakan Sinayan yang dilestarikan tidak ada.

H. Data Kekayaan Sarana Umum

1. TPA / TPSA ada tiga unit
2. Taman Kanak-kanak ada satu unit
3. SD / MDA ada empat unit
4. Puskesmas Pembantu satu unit
5. Posyandu berjumlah empat unit